

ABSTRAK

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP atas LKPD) merupakan laporan pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan yang diterbitkan BPK. LHP atas LKPD memuat hasil pemeriksaan berupa opini BPK mengenai tingkat kewajaran penyajian LKPD dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kabupaten Gunungkidul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD tahun 2014, kemudian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2015. LHP tahun 2014 menunjukkan catatan merah yang cukup banyak terkait pengelolaan aset tetap. Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk menilai ketepatan BPK dalam melakukan prosedur pemeriksaan, memberikan opini atas LKPD, dan menyusun LHP atas LKPD. Pengujian didasarkan kepada UU Nomor 15 Tahun 2004, SPKN 2007, SA 700, dan SA 705. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam memperbaiki kesalahan-kesalahannya dalam LKPD tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan data berupa LHP atas LKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan, kesesuaian pemberian opini, dan penyusunan LHP oleh BPK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan pengelolaan aset tetap di tahun 2014 juga telah diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui pembentukan Petugas Inventarisasi Aset (PIA) dan program-program perbaikan kualitas pencatatan aset tetap di dalam LKPD.

Kata Kunci: Opini BPK, LHP, LKPD, dan Aset Tetap.

ABSTRACT

The Audit Report on the Regional Government Financial Statements (LHP on LKPD) is a financials examination accountability report issued by the BPK. The LHP on the LKPD contains the results of the examination in the form of a BPK opinion regarding the level of fairness of the presentation of the LKPD with generally accepted accounting standards in Indonesia. Gunungkidul Regency obtained a Qualified Opinion in 2014, then obtained an Unqualified Opinion in 2015. The LHP in 2014 provided quite a lot of red notes regarding the management of fixed assets. The preparation of this Final Project Paper aims to assess the accuracy of the BPK in carrying out examination procedures, provide opinions on the LKPD, and compile the LHP on the LKPD. The test is based on UU Number 15 of 2004, SPKN 2007, SA 700, and SA 705. In addition, this study also aims to find out the efforts that have been made by Gunungkidul Regency in correcting its mistakes in the 2014 LKPD. The research method used is a qualitative analysis using data in the form of LHP on the LKPD of Gunungkidul Regency in 2014 and 2015. The results showed that the examination procedures, the suitability of providing opinions, and the preparation of LHP by the BPK were appropriate with applicable regulations. The problem of managing fixed assets in 2014 has also been well resolved by the Gunungkidul Regency Government through the establishment of an Asset Inventory Officer (PIA) and programs to improve the quality of recording fixed assets in the LKPD.

Keywords: BPK Opinion, LHP, LKPD, and Fixed Assets.